

Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023: Perspektif Konstruktivisme

Sinta Julina, S.Sos., M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Jayabaya

e-mail : sinta.delta7@gmail.com

ABSTRACT

The research background is that in the era of a world full of challenges due to the Covid-19 pandemic, Indonesia is optimistic about taking on the duties of the 2023 ASEAN Chair. As Chair of ASEAN 2023, Indonesia certainly has an important role. Therefore, the author is interested in examining Indonesia 's role in the 2023 ASEAN Chair using a Constructivism Perspective. The purpose of this study is to examine and explain Indonesia's role in the 2023 ASEAN Chair using a Constructivism Perspective. To apply the research results, the authors use a descriptive research type. Data collection methods are document-based methods (document-based research) or internet-based methods (internet-based research). In this document-based or internet-based study, data and information are collected and analyzed to understand the phenomenon being studied. The data analysis method is qualitative. Based on the analysis, the results of the study show that the Constructivism Perspective identifies Indonesia's role in the Chair of ASEAN 2023 as a strategic role as a motor for peace, prosperity, regional architectural leaders by incorporating factors or elements of identity, understanding regarding collective identity and the interests of ASEAN not only the interests of Indonesia, providing benefits to regional and global community and make the ASEAN region a world's engine of sustainable growth.

Keywords : Peran, Indonesia, Keketuaan, ASEAN 2023, Perspektif Konstruktivisme

ABSTRAK

Latar belakang penelitian adalah di era dunia yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 maka Indonesia merasa optimis untuk mengemban tugas Keketuaan ASEAN 2023. Sebagai Ketua ASEAN 2023 pasti Indonesia mempunyai peran yang penting. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 dengan menggunakan Perspektif Konstruktivisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan menjelaskan Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 dengan menggunakan Perspektif Konstruktivisme.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode Pengumpulan data yaitu metode berbasis dokumen (*document-based research*) atau metode berbasis internet (*internet-based research*). Dalam studi berbasis dokumen atau internet ini

data dan informasi dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami fenomena yang dikaji. Metode analisis data adalah secara kualitatif. Berdasarkan analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa Perspektif Konstruktivisme mengidentifikasi Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 adalah Peran strategis sebagai motor perdamaian, kesejahteraan, pemimpin arsitektur kawasan dengan memasukkan faktor atau unsur identitas, kesepahaman mengenai identitas kolektif dan kepentingan ASEAN bukan kepentingan Indonesia semata, memberikan manfaat kepada masyarakat regional dan global serta menjadikan kawasan ASEAN sebagai *world's engine of sustainable growth*.

Kata Kunci : Peran, Indonesia, Keketuaan, ASEAN 2023, Perspektif Konstruktivisme

Pendahuluan

Di tengah situasi yang cukup sulit untuk banyak negara namun ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki suara yang penting untuk didengar oleh regional dan global. Setelah sukses dengan Presidensi G20, kini Indonesia kembali dipercaya memegang peranan penting di kancah internasional dengan Keketuaan ASEAN atau ASEAN *Chairmanship* 2023.¹

Untuk mendapatkan manfaat yang optimal atas Keketuaan atau Presidensi ini, Indonesia perlu melakukan peran untuk meningkatkan kapasitas agar lebih memberikan legitimasi yang kuat terhadap manfaat ASEAN. Untuk meneruskan keketuaan dari serah terima Keketuaan ASEAN dari Kamboja ke Indonesia telah dilakukan pada KTT ASEAN ke-42 di Phnom Penh bulan November 2022 lalu. Periode Keketuaan Indonesia di ASEAN sendiri dimulai sejak 1 Januari 2023 dan akan berlangsung selama setahun sampai dengan 31 Desember 2023.²

ASEAN merupakan singkatan dari *The Association of Southeast Asian Nations* atau Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan ditandatanganinya *The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)* oleh 5 (lima) negara anggota, yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999, hingga tahun 2023, ASEAN mempunyai 10 (sepuluh) negara anggota.³

Dengan bertambahnya keanggotaan ASEAN menjadi 10 (sepuluh) negara ini menunjukkan bahwa dengan terbentuknya ASEAN memberikan manfaat serta dampak bagi anggota ASEAN.

¹“KTT ASEAN 2023: Indonesia resmi jadi ketua ASEAN 2023!”, 8 Maret 2023 dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/KTT-ASEAN-2023.aspx> (diakses 27 Maret 2023)

²“Indonesia resmi jadi Ketua ASEAN 2023 : Apa saja tugasnya? “dalam <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-resmi-jadi-ketua-asean-2023-apa-saja-tugasnya> (diakses 27 Maret 2023)

³ “About ASEAN “dalam <https://asean.org/about-asean> (diakses 27 Maret 2023)

Terdapat lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Oleh karena itu, setiap tanggal 8 Agustus, kita memperingati Hari ASEAN atau *ASEAN Day*.⁴

Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima negara anggota, yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.⁵

Sejak ASEAN berdiri tahun 1967, Indonesia tiga kali menjabat sebagai Ketua ASEAN yakni pada tahun 1976, 2003 dan 2011.⁶

Oleh karena ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) sebagai organisasi regional yang mewakili forum ekonomi dunia yang punya posisi strategis secara kolektif mewakili penduduk dunia, perdagangan global dan perekonomian dunia terutama Indonesia sebagai Keketuaan ASEAN 2023 harus segera mulai dari persiapan hingga target yang ingin dicapai. Oleh karena itu, diperlukan peran Indonesia yang masif. Peran Indonesia adalah salah satu solusi untuk masa depan ASEAN. Dalam penelitian ini, penulis akan meninjau dan membatasi pembahasan pada Perspektif Konstruktivisme.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penelitian ini berjudul “Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023: Perspektif Konstruktivisme”. Berdasarkan pokok permasalahan dan identifikasi masalah maka rumusan permasalahannya adalah Bagaimana Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 dalam Perspektif Konstruktivisme? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mendeskripsikan tentang Bagaimana Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 dalam Perspektif Konstruktivisme. Perspektif ini sebagai landasan logis bagi peneliti dalam melakukan suatu studi yang sifatnya berhubungan langsung (*direct relevance*) dengan pokok/ fokus permasalahan. Dalam menerapkan dan menjelaskan hasil penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif ini digunakan dalam menghimpun data aktual, dengan menggambarkan temuan sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif berarti hanya memaparkan situasi dan peristiwa yang ada. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan *document -based research* (metode berbasis dokumen) atau *internet-based research* (metode berbasis internet). Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Peneliti menganggap penelitian kualitatif merupakan penelitian yang cocok untuk digunakan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi wajar (*natural setting*), dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode analisis data sekunder. Data sekunder

⁴ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/KTT-ASEAN-2023.aspx>, *loc.cit*

⁵ “Sejarah dan Tujuan Pembentukan ASEAN diawali persamaan antar negara” dalam <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221202135439-569-881914/sejarah-dan-tujuan-pembentukan-asean-diawali-persamaan-antar-negara>, 07 Desember 2022 (diakses 28 Maret 2023)

⁶ “Peranan Indonesia” dalam <https://setnasasean.id/peranan-indonesia> (diakses 28 Maret 2023)

tersebut meliputi artikel, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan media massa⁷. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk meneliti dan menganalisis Bagaimana Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN dengan menggunakan Perspektif Konstruktivisme. Tujuan dari penelitian kualitatif ini, yaitu untuk memahami aspek dalam kehidupan sosial, yang dalam metodenya tidak menggunakan data sebagai alat analisa melainkan menggunakan kata-kata⁸. Penelitian ini akan dibatasi pada peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 dengan menggunakan perspektif konstruktivisme. Data-data tersebut diambil oleh peneliti melalui studi literatur (studi pustaka) yang relevan, sehingga jenis data tersebut merupakan data sekunder. Data-data diperoleh dari beberapa sumber tertulis yaitu artikel jurnal, buku, serta surat kabar online yang memiliki korelasi dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh melalui internet maupun perpustakaan

Theoretical Framework

Kerangka teori (*theoretical framework*) adalah suatu struktur yang dibangun berdasarkan telaah literatur ilmiah yang dapat dijadikan sebagai landasan logis bagi peneliti dalam melakukan suatu studi yang sifatnya berhubungan langsung (*direct relevance*) dengan pokok/fokus permasalahan. Teori merupakan suatu kerangka yang sifatnya mendukung (*protagonistic*) atau yang bersifat ilmiah yang dapat dijadikan sebagai landasan logis bagi peneliti dalam melakukan suatu studi. Teori adalah kerangka berpikir yang dibangun dengan menghubungkan sejumlah konsep melalui proposisi-proposisi yang logis sehingga dapat memberikan makna terhadap sejumlah fakta yang keberadaannya tidak beraturan.⁹

Teori Konstruktivisme

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Perspektif Konstruktivisme. Konstruktivisme mengajarkan bahwa dunia yang terbentuk pada kenyataannya bukan didasarkan oleh struktur politik maupun sifat dasar manusia melainkan sebuah konsekuensi yang berasal dari pengalaman sejarah yang kemudian mampu membangun sebuah kenyataan sosial. Semua tindakan atau keputusan masa sekarang memiliki kaitan erat dan dilakukan penelusuran pengalaman-pengalaman yang telah terjadi sebelumnya di masa lampau. Kenyataan sosial yang terjadi sekarang adalah konsekuensi atas semua tindakan yang telah dilakukan di masa lalu. Dalam disiplin hubungan internasional, konstruktivisme adalah pandangan bahwa aspek-aspek penting hubungan internasional dikonstruksi oleh sejarah dan masyarakat, bukan dampak mutlak dari sifat manusia atau ciri khas politik dunia lainnya.¹⁰

⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (London: SAGE Publications, 2009), hal. 175.

⁸ Michael Quinn Patton and Michael Cochran, *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*. London: Research Officer MSF. 2002.

⁹ Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik Cakra Studi Global Strategis (CSGS)*, Surabaya, Cetakan Pertama, Desember 2016, hal 5

¹⁰ Patrick Thaddeus Jackson and Daniel H. Nexon, "Whence Causal Mechanisms? A Comment on Legro" in *Dialogue IO* Vol. 1, 2002 (diakses 02 April 2023)

Nicholas Onuf diakui sebagai tokoh yang mencetuskan istilah "konstruktivisme" untuk menyebut teori yang menegaskan konstruksionisme sosial dalam hubungan internasional.¹¹ Teori konstruktivis kontemporer berawal dari pemikiran Onuf, Richard K. Ashley, Friedrich Kratochwil, John Ruggie, dan Christian Reus-Smit. Namun demikian, Alexander Wendt merupakan pendukung konstruktivisme sosial ternama dalam bidang hubungan internasional. Artikel Wendt tahun 1992 berjudul "*Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics*" di *International Organization* menjadi dasar teori yang menantang kekeliruan kaum neorealis dan institusionalis neoliberal, termasuk pandangan materialismenya. Dengan menunjukkan bahwa konsep utama realis seperti "politik kekuasaan" dikonstruksi secara sosial, artinya tidak diturunkan oleh alam dan dapat diubah oleh praktik manusia, Wendt membuka jalan bagi para ilmuwan hubungan internasional untuk melakukan penelitian dalam berbagai hal dari sudut pandang konstruktivis. Wendt mengembangkan gagasannya dalam *Social Theory of International Politics* (1999).¹² Sebagai pendekatan, Konstruktivisme adalah pendekatan teoritis Hubungan Internasional (HI) yang mulai populer sejak dekade 1990an setelah Perang Dingin berakhir. Pendekatan ini membahas tentang asal mula kemunculan perspektif konstruktivisme dalam Studi HI kontemporer, karakteristik dasar dan prinsip utama dari konstruktivisme, cara pandang konstruktivis tentang politik global, dan relevansi konstruktivisme sebagai referensi teoritis maupun metodologis untuk kegiatan analisis serta riset hubungan internasional.¹³

Konstruktivisme dipahami sebagai perspektif Hubungan Internasional yang mengedepankan makna dan interpretasi bersama sebagai komponen analitis esensial di balik tindakan para aktor. Konstruktivis memposisikan peran gagasan lebih penting daripada teori Hubungan Internasional konvensional yang berfokus pada kepentingan material. Berbeda dengan neo-neo yang menganggap faktor di balik perilaku aktor dalam hal ini materialisme strategis bersifat relatif konstan, konstruktivis menganut pandangan bahwa aspek ideasional di balik perilaku aktor akan selalu mengalami perubahan sebagai respon terhadap aneka dimensi sosial dan sosialisasi yang terus berlangsung.

Dengan demikian, konstruktivis selalu mengadakan proses konstruksi dan rekonstruksi terhadap fakta dan praktek sosial yang bekerja di balik tatanan politik global.¹⁴ Karakteristik interaksi politik antaraktor tidak melulu didominasi oleh kompetisi kepentingan material, tetapi lebih kompleks melibatkan ide, nilai dan institusi.¹⁵ Para konstruktivis menjelaskan bagaimana aspek non material mempengaruhi kebijakan luar negeri, misalkan melalui dua konsep dasar, yakni identitas dan norma. Aktor-aktor internasional bertindak menurut

¹¹Robert Howard Jackson and George Sørensen (2010). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, 4th Edition. Oxford University Press. hal. 166.

¹²"Konstruktivisme (Hubungan Internasional)" dalam ([https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Konstruktivisme_\(hubungan_internasional\)](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Konstruktivisme_(hubungan_internasional))) (diakses 07 April 2023)

¹³ I Gede Wahyu Wicaksana, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, hal 147

¹⁴ *Ibid* hal 154

¹⁵ *Ibid* hal 160-161

identifikasi mereka terhadap eksistensi aktor lain dan respon mereka terhadap kaedah interaksi yang berlaku dalam lingkungan tertentu.¹⁶ Hasil dari kedua jenis pengamatan baik terhadap identitas maupun norma adalah persepsi masing-masing aktor tentang situasi eksternal. Berdasarkan atas pemahaman situasional inilah kebijakan luar negeri didesain sebagai respon kognitif, psikologis dan sosial.¹⁷ Pendekatan konstruktivis mengenai orientasi kebijakan luar negeri bersifat humanis (*human-centric approach*), yang berarti bahwa faktor intrinsik dalam diri individu yang ambil bagian dalam proses politik berperan penting untuk menentukan arah dan target tindakan.¹⁸ Jadi tidak seperti para neo-neo rasionalis yang kukuh dengan kalkulasi material strategis, yang mengandaikan individu dan kebijakan ataupun tindakan dilakukan senantiasa berdasarkan perhitungan untung rugi.¹⁹ Para konstruktivis memberikan penekanan yang berbeda dengan materialisme ataupun positivisme hukum internasional ala liberalisme. Faktor identitas, kesepahaman mengenai identitas kolektif lebih berpengaruh daripada observasi kondisi alamiah para aktor. Konstruktivis menggunakan persepsi sebagai alat analisis yang secara kritis memandangi bahwa penerimaan maupun penolakan atas keberlakuan tradisi dan aturan main dalam interaksi antar bangsa di latarbelakangi oleh faktor konsensus. Akibatnya, determinasi kekuatan fisik aktor tidak akan efektif membuat kepatuhan terhadap kaedah internasional yang diterapkan dalam sistem, melainkan seberapa besar kesepakatan bersama; dalam bentuk apa kesepakatan bersama; dan untuk berapa lama kesepakatan bersama bisa dipertahankan melalui komunikasi dan dialog antar aktor. Dalam proses penerimaan norma internasional, konstruktivis mengatakan model sosialisasi yang dipraktikkan di berbagai tempat dan isu berbeda menurut karakter relasi sosial dan budaya yang berlangsung antar aktor.²⁰ Konstruktivisme berusaha menunjukkan bahwa aspek-aspek inti hubungan internasional dikonstruksi secara sosial, berlawanan dengan asumsi neorealisme dan neoliberalisme, artinya aspek tersebut diwujudkan oleh proses praktik dan interaksi sosial. Alexander Wendt menyatakan bahwa dua inti dasar konstruktivisme adalah "struktur hubungan manusia lebih ditentukan oleh gagasan bersama alih-alih dorongan materi, dan identitas beserta kepentingan aktor yang berkepentingan dikonstruksi oleh gagasan bersama alih-alih diturunkan secara alamiah."²¹ Konstruktivisme, menurut Wendt, menantang asumsi dasar neorealis. Politik internasional cenderung ditentukan oleh kenyataan bahwa sistem internasional bersifat anarkis; sistem internasional tidak memiliki badan berwenang di atasnya, namun terdiri dari unit-unit (negara) yang setara dan berdaulat atas wilayahnya sendiri. Menurut neorealis, anarki memaksa negara bertindak semestinya dan menggantungkan keamanannya pada diri sendiri (kemandirian). Cara anarki mendesak

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *ibid*

²⁰ *ibid*, hal, 163

²¹ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hal 1

negara bertindak demikian untuk mempertahankan kepentingan kekuasaannya menjelaskan sebagian besar politik internasional. Karena itu, kaum neorealis cenderung menolak penjelasan politik internasional di tingkat "unit" atau "negara".²² tersebut dengan menunjukkan bahwa dorongan penyebab (kausal) terkait "struktur" menurut neorealis ternyata tidak "diturunkan", melainkan bergantung pada cara praktik sosial mengonstruksi struktur. Selain menolak anggapan tentang sifat identitas dan kepentingan aktor dalam sistem internasional serta makna yang ditanamkan lembaga sosial (termasuk anarki) kepada aktor, Wendt berpendapat bahwa "struktur" neorealis tidak mengungkap banyak hal: "[mereka] tidak memperkirakan apakah dua negara akan terus berteman atau bermusuhan, mengakui kedaulatan satu sama lain, membina hubungan turun temurun, mengubah sikapnya atau tidak, dan lain-lain"²³ Karena ciri-ciri perilaku tersebut tidak dijelaskan oleh anarki dan membutuhkan bukti kepentingan dan identitas yang dipegang para aktor utama, fokus neorealisme terhadap struktur material sistem (anarki) tidak tepat²⁴ Selain itu, Wendt berpendapat bahwa karena cara anarki mengekang negara bergantung pada cara negara memandang anarki beserta identitas dan kepentingannya sendiri, anarki tidak harus menjadi sistem yang mandiri. Anarki hanya memaksa negara bersikap mandiri bila mereka mengikuti asumsi neorealis bahwa negara memandang keamanan sebagai konsep relatif yang bersaing, ketika satu negara semakin kuat, negara lain semakin lemah. Apabila negara memiliki pandangan lain tentang keamanan, misalnya "kooperatif" (negara dapat memaksimalkan keamanannya tanpa melemahkan keamanan negara lain) atau "kolektif" (negara menganggap keamanan negara lain lebih penting bagi dirinya), anarki tidak akan membangkitkan kemandirian sama sekali.²⁵ Kesimpulan neorealis sangat bergantung pada asumsi mutlak tentang cara aktor mengonstruksi makna lembaga sosial. Kaum neorealis tidak melihat ketergantungan itu, mereka secara keliru menganggap bahwa makna tersebut tak dapat digantikan dan enggan mempertimbangkan kajian proses konstruksi sosial yang sebenarnya merupakan kunci penjelas neorealisme. Ada 2 (dua) gagasan kunci Konstruktivisme yang relevan bagi studi Hubungan Internasional yaitu:²⁶ Keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh *shared ideas* (gagasan-gagasan yang diyakini bersama) dari pada kekuatan gagasan kunci konstruktivis mematerial. Keyakinan tersebut merepresentasikan perspektif idealis yang pernah mendominasi disiplin Hubungan Internasional terutama sebelum perang dunia ke II; Kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan oleh *shared ideas* dari pada factor- factor alam. Artinya tindakan setiap aktor tidak semata-mata

²² Kenneth Waltz, *Theory of International Politics* (McGraw-Hill Higher Education, 1979)

²³ Alexander Wendt, "Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics" in *International Organization* (46:2, Spring 1992), hal..396

²⁴ *ibid* hal .396–399

²⁵ *Ibid*, hal .399–403

²⁶ Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik Sugiarto Pramono dan Andi Purwono dalam publikasi <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/485/607>, Vol.7 No.2 (2010), hal 14 (diakses 15 April 2023)

ditentukan oleh motif, alasan dan kepentingan mereka akan tetapi lebih dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan di sekitarnya (struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya). Dengan demikian perspektif ini mewakili aliran strukturalisme dalam teori konstruktivisme.

Konsep konstruktivisme tentang struktur sosial sebagaimana dijelaskan oleh Alexander Wendt (1992), terdiri dari sedikitnya tiga komponen: ²⁷

- (1) pengetahuan bersama;
- (2) sumberdaya material;
- (3) praktik.

Pengetahuan bersama merupakan dimensi pengetahuan yang terkonstruksi oleh interaksi di antara banyak aktor. Ia bersifat tersubjektif dan sangat dinamis.

Pengetahuan bersama itu kemudian menjadi variabel yang turut menata, mengatur, dan menjadi acuan bagi aktor-aktor dalam bertindak laku. Teoritis konstruktivisme berkeyakinan, bahwa dunia sosial bukanlah sesuatu yang *given*, dunia sosial bukan sesuatu di "luar sana". Melainkan dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif²⁸

Pengetahuan bersama itu kemudian menjadi pengetahuan yang mereka bangun sendiri secara kolektif dan bersifat sangat dinamis.

Konstruktivisme justru melihat pada beragam dimensi yang bersifat konstruksi gagasan sebagai akibat interaksi di antara para aktor, seperti norma, budaya dan lain sebagainya.

Para teoritis konstruktivisme meyakini aneka konstruksi gagasan kolektif tersebut merupakan produk dari berbagai interaksi dari aktor-aktor dalam ranah empirik. Bangunan gagasan tersebut bersifat sangat dinamis dan menjadi variabel yang berimplikasi pada cara aktor melihat diri dan lingkungannya. Pada konteks ini aktor-aktor dalam ranah hubungan internasional menentukan identitasnya, kepentingannya dan akhirnya tindakan aktor tersebut. Andrew Bradley Phillips secara lebih tegas menulis:

".....constructivists' focus on the role played by ideational factors...".²⁹

Hakekat manusia menurut konsepsi konstruktivisme lebih bersifat bebas dan terhormat karena dapat menolak atau menerima sistem internasional, membentuk kembali model relasi yang saling menguntungkan, atau yang diinginkan berdasarkan peraturan, strukturasi dan *verstehen* dalam *speech act*.³⁰ Konstruktivisme bukanlah pola yang diinduksikan dari fakta

²⁷ *ibid*, hal 15

²⁸ Jackson, Robert dan George Sorensen, terj. Dadan Suryadipura. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 307.

²⁹ Phillips, Andrew Bradley. "Constructivism". Dalam Andrew Bradley Phillips (Ed). (2007). *International Relations Theory for the Twenty-First Century An introduction*. USA: Roudledge. hal 68.

³⁰ Adi W, Anugrah. (2009). *Konstruktivisme dalam Pembelajaran Hubungan Internasional dalam* <http://awaxhi.wordpress.com/2009/02/08/konstruktivisme-dalam-pembelajaran-hubunganinternasional/>, (diakses pada 15 April 2023)

empirik. Ia justru sebaliknya merupakan gagasan yang dikonstruksi dari interaksi di antara banyak aktor.³¹

Identitas dan Kepentingan

Kaum konstruktivis menolak pendapat neorealis tentang dampak pasti anarki terhadap perilaku aktor internasional dan menjauh dari materialisme yang dikemukakan kaum neorealis. Mereka memberi ruang bagi identitas dan kepentingan aktor internasional dalam teori hubungan internasional. Karena para aktor tidak dikendalikan oleh sistem mandiri, identitas dan kepentingannya perlu dilibatkan dalam analisis perilakunya. Seperti sifat sistem internasional, para konstruktivis memandang bahwa identitas dan kepentingan tidak didasarkan secara objektif pada desakan material (misalnya sifat manusia yang mendasari realisme klasik), namun merupakan hasil dari gagasan dan konstruksi sosial terhadap gagasan tersebut. Dengan kata lain, makna gagasan, objek, dan aktor dibentuk oleh interaksi sosial. Manusia memberi makna terhadap objek tersebut dan memberi banyak sekali makna terhadap berbagai hal. Maka, hal-hal yang dianggap sebagai sesuatu yang eksak oleh kaum realis (atau positivis secara keseluruhan) sebenarnya merupakan sesuatu yang dikonstruksikan dan bersifat tidak tetap.³²

Martha Finnemore adalah teoriawan berpengaruh yang mempelajari keterlibatan organisasi internasional dalam proses konstruksi sosial terhadap cara aktor memandang kepentingannya sendiri. Dalam *National Interests In International Society*, Finnemore berusaha "mengembangkan pendekatan sistemik untuk memahami kepentingan negara dan perilaku negara dengan mempelajari struktur internasional, bukan struktur kekuasaannya, melainkan struktur makna dan nilai sosialnya". Katanya, "kepentingan tidak terletak 'nun jauh di sana' menunggu untuk ditemukan; kepentingan dikonstruksi melalui interaksi sosial".³³ Menjelaskan realita hubungan internasional yang sejatinya mereka anggap sebagai *share of ideas* dari para pelaku dalam ranah empiris dunia ini. Aktor-aktor dalam memilih tindakannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka namun oleh gagasan yang mereka bangun sendiri, karena sejatinya kepentingan pun bila diruntut ke belakang akan samapai pada gagasan. Konstruktivisme menganggap kepentingan sekalipun merupakan kesepakatan inter subjektif, Argumentasi ini sejalan dengan pikiran Bob Sugeng yang menulis: Kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan oleh shared ideas dari pada faktor-faktor alam. Artinya tindakan setiap aktor tidak semata-mata ditentukan oleh motif, alasan dan kepentingan mereka akan tetapi lebih dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan disekitarnya (struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain

³¹ Sugiarto Pramono dan Andi Purwono, *op.cit* hal.16

³² [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Konstruktivisme_\(hubungan_internasional\)](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Konstruktivisme_(hubungan_internasional)), *loc.cit*

³³ Martha Finnemore, *National Interests In International Society* (New York: Cornell University Press, 1996), hal.2

sebagainya).³⁴ Sikap konstruktivis terhadap kepentingan dan identitas negara bahwa kepentingan dan identitas merupakan penentu utama perilaku negara. Walaupun ada perpindahan fokus ke kepentingan dan identitas (properti negara), kaum konstruktivis juga tidak perlu memfokuskan analisis mereka di tingkat unit dalam politik internasional (negara). Ahli teori konstruktivis seperti Finnemore dan Wendt sama-sama menegaskan bahwa meski gagasan dan proses cenderung menjelaskan konstruksi kepentingan dan identitas secara sosial, gagasan dan proses membentuk strukturnya sendiri yang mempengaruhi aktor internasional. Perbedaan utama konstruktivisme dengan neorealisme adalah konstruktivisme memandang struktur politik internasional sebagai gagasan, bukan materi.³⁵ Menurut konstruktivisme, kepentingan negara dibentuk berdasarkan identitas yang dimiliki oleh negara. Identitas negara dan kepentingan negara tersebut yang menentukan perilaku negara dalam melakukan interaksi. Untuk mengetahui alasan perilaku suatu negara perlu mengidentifikasi identitas negara. Wendt memberikan pandangan bahwa untuk mengetahui identitas negara dapat dilihat dari perilaku negara dalam dunia internasional. Wendt juga memberikan argumen bahwa semua kepentingan negara berasal dari identitasnya.³⁶ Katzenstein (1996) menjelaskan bahwa aktor tidak dapat menentukan kepentingan mereka sebelum mengetahui “*what they are representing*” dan “*who they are*”. Dengan kata lain, kepentingan berasal dari identitas dan kepentingan akhirnya mempengaruhi perilaku negara.³⁷ Berfokus pada ide, norma, identitas, dan hal-hal non-material lainnya. Hal ini senada dengan Kratochwil yang memiliki pandangan bahwa konstruksi hidup bersama dalam komunitas internasional merupakan sebuah proses interaksi yang dijalin antar subjek yang dibentuk oleh beberapa unsur seperti unsur kepentingan (*interest*), identitas (*identity*), maksud (*intention*), dan nilai-nilai (*values*) yang kemudian mampu menjadi alasan suatu subjek menganggap subjek lain sebagai ‘kawan’ atau ‘lawan’.³⁸

Gambaran Umum tentang ASEAN

Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, lima Wakil Negara/ Pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia (Adam Malik), Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional

³⁴ Hadiwinata, Bob Sugeng. “Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme”. Dalam Yulius P. Hermawan. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal 20-21.

³⁵ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hal.29-33

³⁶ A Wendt (1999) dalam Maxym Alexandrov, “The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical Analysis,” *Journal of International Development and Cooperation* 10 (1). 2003.

³⁷ Fariz Ruhiat, and Akim -. 2020. “Klaim Sepihak Donald Trump Terhadap Kota Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Dalam Perspektif Konstruktivisme”. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16 (1):19-30. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3361.19-30>, hal. 5

³⁸ Friedrich Kratochwil, *Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs* Cambridge: Cambridge University Press. 1989, hal .20-23.

Malaysia (Tun Abdul Razak), Menteri Luar Negeri Filipina (Narciso Ramos), Menteri Luar Negeri Singapura (S. Rajaratnam), dan Menteri Luar Negeri Thailand (Thanat Khoman) menindaklanjuti Deklarasi Bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan Deklarasi ASEAN (*The ASEAN Declaration*) atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok (*Bangkok Declaration*).³⁹

Isi Deklarasi Bangkok itu adalah sebagai berikut:⁴⁰

Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara;
Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional;
meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada;
Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.

Pada awal terbentuknya organisasi ini bertujuan untuk menggalang kerja sama dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerja sama dalam berbagai bidang kepentingan bersama. Perkembangan berikutnya organisasi ini membuat berbagai agenda yang signifikan di bidang politik yaitu Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration/ ZOPFAN*) yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian tahun 1976, 5 (lima) negara anggota ASEAN itu juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/ TAC*). TAC ini yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai. Di bidang ekonomi, *Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements* (PTA) berhasil disepakati dan ditandatangani di Manila pada 24 Februari 1977 yang menjadi landasan untuk mengadopsi berbagai instrumen dalam liberalisasi perdagangan on a *preferential basis*. Berikutnya adalah *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) *Scheme for the ASEAN Free Trade Area* berhasil disepakati di Singapura pada 28 Januari 1992. Perkembangan tersebut mendorong negara-negara lain di Asia Tenggara bergabung menjadi anggota ASEAN. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam Sidang Khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*) di Jakarta, Indonesia. Kemudian Vietnam resmi menjadi anggota ke-7 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Seri Begawan,

³⁹“Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan ASEAN” dalam https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean, 17 Maret 2015 (diakses 08 Mei 2023)

⁴⁰ *ibid.*

Brunei Darussalam. Pada tanggal 29-30 Juli 1995 Laos dan Myanmar resmi menjadi anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN pada pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, 23-28 Juli 1997. Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN dalam Upacara Khusus Penerimaan pada tanggal 30 April 1999 di Hanoi. Perkembangan dan kemajuan ASEAN dari masa ke masa adalah sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN yaitu untuk menjalin persahabatan dan kerja sama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai dan makmur. Cita-cita tersebut kemudian dipertegas dengan kesepakatan Bali *Concord* I tahun 1976. Para Pemimpin ASEAN menyepakati program aksi yang mencakup kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan penerangan, keamanan, dan peningkatan mekanisme ASEAN. Kesepakatan tersebut menandai tahapan penting bagi kerangka kerja sama ASEAN dalam menjaga perdamaian, stabilitas serta peningkatan kesejahteraan di Kawasan Asia Tenggara.

Persamaan Anggota ASEAN

Di dalam sebuah buku Mengenai ASEAN dan Negara-negaranya karya Tri Prasetyono, disebutkan bahwa ada beberapa persamaan lain yang dimiliki oleh anggota ASEAN, yaitu:⁴¹

1. Sama-sama terletak di kawasan yang sama, yaitu Asia Tenggara.
2. Sama-sama memiliki sejarah pernah dijajah oleh bangsa barat.
3. Memiliki kepentingan yang sama, yaitu mencegah pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
4. Sama-sama memiliki dasar kebudayaan Melayu Austronesia.
5. Memiliki kepentingan yang sama dalam berbagai permasalahan di bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya.

Manfaat ASEAN bagi Indonesia⁴²

Menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju;

Menjalinkan kerja sama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi, antara lain, perluasan perdagangan, investasi, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pendidikan; Sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama di forum internasional;

⁴¹ "Kepanjangan ASEAN: Sejarah, Tujuan, dan Daftar Lengkap Anggota", 19 Juni 2023 dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6780630/kepanjangan-asean-sejarah-tujuan-dan-daftar-lengkap-anggota> (diakses 20 Juni 2023)

⁴² <https://setnasasean.id/peranan-indonesia,loc.cit>

Tema ASEAN 2023

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyebutkan tema dari ASEAN 2023 adalah "*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*". Tema tersebut terdiri dari dua elemen besar yaitu:

⁴³ Elemen pertama adalah *ASEAN Matters*. Bagaimana Indonesia dengan keketuaannya tetap menjadikan ASEAN itu relevan dan penting tidak saja bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi rakyat ASEAN dan *beyond*. Jadi *beyond*-nya itu ada, di luar ASEAN. Untuk elemen kedua, ASEAN sebagai pusat pertumbuhan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN selalu bertumbuh lebih tinggi dibandingkan negara lain di luar ASEAN. Dengan kata lain, "*ASEAN Matters*" bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. ASEAN berperan penting tidak hanya bagi negara di dalam kawasan, tetapi juga bagi dunia. Baik berperan sentral sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan kawasan.⁴⁴ "*Epicentrum of Growth*" bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia.⁴⁵

Analisis Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023: Perspektif Konstruktivisme

Dengan menggunakan Perspektif Konstruktivisme maka penulis dapat menganalisis Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023. Perspektif konstruktivisme merupakan paradigma yang tepat digunakan dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Realisme yang berfokus pada *power* dan kekuasaan, Liberalisme berfokus pada kerjasama, Konstruktivisme hadir dengan pendekatan yang lebih kompleks. Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 bukan hanya sekedar *power* negara Republik Indonesia ataupun hanya terjalin kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN namun lebih dari itu. Konstruktivisme merupakan perspektif yang mampu menjawab dengan memasukkan unsur identitas (*identity*) dan kepentingan (*interest*). Unsur-unsur tersebut akan mampu menjawab peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Dari unsur identitas disebabkan adanya kesamaan identitas sebagai negara anggota ASEAN di Kawasan regional Asia Tenggara. Di dalam unsur kepentingan (*interest*), adanya kepentingan Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023.

Begitupula di bidang maritim, Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama keamanan maritim, terutama dalam penanggulangan isu *illegal, unreported, and unregulated fishing*. Selain itu, Indonesia adalah negara pendorong yang mengupayakan kerja sama penanggulangan terorisme, radikalisme dan *violent extremism*.

Peran aktif dalam merespon perkembangan isu *Rakhine State* dibukanya akses bantuan kemanusiaan ke *Rakhine State*, yaitu bantuan kemanusiaan, menawarkan berbagai inisiatif

⁴³ <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-resmi-jadi-ketua-asean-2023-apa-saja-tugasnya>, loc.cit

⁴⁴ "ASEAN Matters : Epicentrum of Growth " dalam 28 Februari 2023 dalam <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/makassar2/id/data-publikasi/artikel/3158-mengenal-peran-indonesia-dalam-keketuaan-asean-2023.html> (diakses 20 Juni 2023)

⁴⁵ *ibid*

untuk membantu rekonsiliasi nasional dan dialog serta mendorong Myanmar memberikan perkembangan secara berkala mengenai perkembangan situasi di *Rakhine* sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif di Myanmar.

Dalam isu pekerja migran, Indonesia berupaya untuk menghapuskan diskriminasi di lingkungan kerja serta memberikan jaminan perlindungan, terutama bagi para pekerja informal.

Pada tahun 2023, menjadi kali kelima, Indonesia didapuk memegang Keketuaan ASEAN. Sesuai dengan tema “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*” maka peran Indonesia adalah ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Indonesia ingin membawa ASEAN menjadi kawasan yang memiliki peran penting, bagi negara kawasan dan dunia. ASEAN dapat berperan sentral sebagai motor perdamaian serta mencapai kesejahteraan kawasan. Indonesia juga berperan menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia.

Untuk mewujudkannya, telah disusun 3 Pilar *Priorities Economic Deliverables*, yaitu:⁴⁶

a. *Recover-Rebuilding*

ASEAN bertujuan untuk mengeksplorasi *policy mix* yang terkalibrasi, direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta memitigasi risiko seperti inflasi dan volatilitas aliran modal.

b. *Digital Economy*

Untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital, negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kapasitas masing-masing dalam memformulasikan strategi edukasi finansial secara nasional dan meningkatkan interkoneksi sistem pembayaran regional.

c. *Sustainability*

Sebagai kawasan yang paling terdampak oleh bencana alam dan risiko terkait iklim, ASEAN perlu merapatkan barisan guna mempersiapkan dan mengarah ke tujuan yang sama dalam kaitan transisi menuju ekonomi hijau, diantaranya melalui penyusunan *ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance* dan *Study on the Role of Central Banks in Managing Climate and Environment-Related Risk*.

Interaksi antar negara di kawasan Asia Tenggara sangat diperlukan sehingga dapat membentuk regionalisme seperti Uni Eropa saat ini. Indonesia harus dapat berperan menjaga keamanan di Asia Tenggara. Indonesia harus berperan dan mampu untuk membentuk dan mengubah hubungan internasional melalui ide dan pikirannya yang dapat terjadi melalui perubahan norma, hukum, kemampuan ekonomi, perkembangan teknologi hingga pendidikan. Kepentingan Indonesia muncul sebagai hasil dari interaksi sosial dan hasil berpikir/ide.

Konstruktivisme menawarkan penjelasan yang lebih berdasarkan pada identitas, norma serta sejarah yang dimiliki aktor dalam pengambilan keputusannya dibandingkan menggunakan

⁴⁶ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/KTT-ASEAN-2023.aspx>, *loc. cit*

kalkulasi untung rugi semata. Dengan kata lain Indonesia akan berperan sebagai Ketua ASEAN tanpa mengkalkulasikan untung dan rugi tetapi dengan berbagai aspek berbeda yang tidak sekedar terbatas pada tataran material saja, Indonesia akan tetap mempertahankan identitas ASEAN sehingga dapat mencapai kepentingan bersama ASEAN. Melalui tema Keketuaan ASEAN yaitu: “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*”, Indonesia bertekad untuk mengarahkan kerja sama ASEAN tahun 2023 dengan melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kawasan. Indonesia juga berperan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ASEAN. Setelah sukses menyelenggarakan Presidensi G20, Indonesia kembali menjalankan kepemimpinan internasional dengan memegang tongkat keketuaan ASEAN 2023. Keketuaan tersebut diserahkan dari Kamboja ke Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Phnom Penh bulan November 2022.⁴⁷ Pada tahun 2023, Indonesia juga akan fokus memperkuat ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai Ketua, Indonesia mempunyai tujuan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN agar mampu menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Kepemimpinan Indonesia dalam Keketuaan ASEAN berarti menandakan kepercayaan kawasan regional kepada Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan kawasan regional ASEAN pasca pandemi COVID-19. Keketuaan Indonesia juga peluang dan menunjukkan peluang dan peran strategis Indonesia dalam memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan ASEAN yaitu mencapai tatanan kawasan yang mendasarkan pada multilateralisme dan nilai-nilai inklusivitas. Sebagai Ketua ASEAN, Presiden Jokowi menyampaikan optimismenya bahwa ASEAN akan tetap relevan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang penting di kawasan. Dengan kata lain Indonesia bertekad mengarahkan kerja sama ASEAN tahun 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global. Indonesia dalam hal ini berperan untuk memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, untuk kemakmuran rakyat di Asia Tenggara sesuai dengan Tema ASEAN 2023. Sebagai salah satu negara pendiri dan negara terbesar di ASEAN, Indonesia harus berperan untuk merekonstruksi Nilai dan Identitas ASEAN yaitu dapat memfasilitasi berbagai terobosan dan inovasi sebagai solusi dalam mengatasi tantangan dan permasalahan dunia yang juga dihadapi oleh Kawasan Asia Tenggara saat ini. Kepercayaan dan dukungan berbagai pihak terhadap keketuaan Indonesia merupakan buah dari strategi diplomasi Indonesia sesuai dengan praktik dan interaksi sosial dan adanya kesepakatan bersama untuk tetap dipertahankan melalui komunikasi dan dialog antar negara anggota ASEAN. Hal ini terbukti dengan terpilihnya Indonesia dalam Keketuaan ASEAN yang Ke-5 sejak awal pembentukannya ASEAN di tahun 1967 sampai tahun 2023. Di tiap periode keketuaan tersebut, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan politik

⁴⁷<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-resmi-jadi-ketua-asean-2023-apa-saja-tugasnya,loc.cit>

internasional yang tidak mudah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang diterapkan Indonesia selama menjadi Ketua ASEAN bersifat humanis (*human centric approach*) tidak berdasarkan kalkulasi untung-rugi Faktor identitas, kesepahaman mengenai identitas kolektif lebih berpengaruh.

“*Epicentrum of Growth*” bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. Indonesia sebagai Ketua memiliki tujuan untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan. Indonesia dalam hal ini menunjukkan Perannya sesuai dengan Identitas dan Kepentingan ASEAN atau kepentingan bersama bukan atas kepentingan dan identitas Indonesia sebagai aktor Hubungan Internasional tetapi Indonesia lebih kooperatif dengan memaksimalkan keamanannya tanpa melemahkan keamanan negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia menganggap keamanan ASEAN lebih utama dan penting daripada kepentingan keamanan Indonesia sendiri. Oleh karena pertumbuhan ekonomi ASEAN hampir selalu berada di atas rata-rata dunia maka perlu dilakukan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan kerjasama, ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, dan stabilisasi keuangan sehingga ASEAN dapat mewujudkan perannya sebagai pusat “episentrum pertumbuhan”.

Identitas dan Kepentingan Indonesia lebih ditentukan oleh *shared ideas* artinya peran dan tindakan Indonesia tidak ditentukan oleh kepentingan, alasan atau motif dari Indonesia sendiri tetapi dibentuk oleh interaksi antara negara anggota ASEAN dalam struktur sosial ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dalam lembaga ASEAN. Oleh karena itu masih banyak yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2023 karena memiliki tantangan dan permasalahan internasional yang cukup kompleks, baik dari segi geopolitik maupun ekonomi, yaitu:

1. Persaingan negara besar, seperti antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan Amerika Serikat dan Rusia.
2. Keadaan ekonomi yang masih dalam kondisi pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang kemudian menimbulkan berbagai krisis—ekonomi, pangan, energi, hingga perang.
3. Isu Myanmar yang kembali menguji kapasitas dan efektivitas ASEAN dalam mengatasi permasalahan internal.

Berbagai tantangan tersebut berpotensi mengancam stabilitas kawasan, melemahkan sentralitas, dan mengancam relevansi ASEAN sebagai aktor yang berperan dalam membentuk tatanan di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.

Oleh karena itu, peran Indonesia harus mengedapankan dan mewujudkan tujuan dari gagasan awal terbentuknya ASEAN serta gagasan dalam Tema ASEAN 2023 yaitu : *ASEAN Matters: Epicentrum of Growth* daripada kepentingan material Indonesia. Semakin relevan dengan Peran Indonesia yang tidak didominasi oleh kompetisi kepentingan material tetapi lebih kompleks melibatkan ide, nilai, dan institusi. Dengan kata lain ada ide dan norma

untuk mencapai stabilitas dan kemakmuran regional di Indo-Pasifik, dengan peran Indonesia menjadi fasilitator menjadikan ASEAN relevan dan penting, tidak saja bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi rakyat ASEAN dan rakyat di luar ASEAN. Hal ini akan meningkatkan kemandirian ASEAN dengan memperkuat kesiapan ASEAN dalam menghadapi tantangan saat ini dan di masa depan serta menghadapi ASEAN 2045.

Peran Indonesia dibentuk oleh interaksi antar anggota ASEAN dengan mengedepankan dialog mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), mencegah perdagangan orang, penguatan Kerjasama ASEAN, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berkeadilan yang kuat dan berkelanjutan, pengembangan arsitektur kesehatan, memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, transisi energi fosil ke energi bersih dan terbarukan, memperkuat stabilitas keuangan serta ketahanan ekonomi. Dengan tema yang diangkat, peran Indonesia adalah untuk mengarahkan kerja sama ASEAN yang lebih maksimal lagi sehingga dapat melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global. Selain itu Indonesia akan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran seluruh masyarakat ASEAN. Indonesia juga menginginkan ASEAN untuk memainkan peran sentral sehingga dapat menjadi motor serta dapat berkontribusi bagi stabilitas dan perdamaian Kawasan, termasuk Indo-Pasifik. Keketuaan Indonesia dalam ASEAN pada tahun 2023 ini mampu membawa ASEAN menjadi organisasi regional yang tangguh, kuat dan tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan internasional. Peran Indonesia dapat membawa ASEAN ke bawah-membumi dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat ASEAN. Dengan diadakannya KTT ASEAN 2023 dapat menjadi milestone dalam memastikan bahwa kerjasama ASEAN mendatang dapat lebih meningkatkan upaya bersama menjadikan ASEAN menjadi organisasi yang lebih adaptif, responsif, dan berdaya saing dengan turut menegakkan hukum internasional dan menjaga kesatuannya. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen Indonesia dengan memimpin pembentukan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) yang diadopsi oleh ASEAN pada tahun 2019 sebagai penegasan akan sentralitas ASEAN. Penguatan penegasan dan sentralitas ASEAN diperlukan dengan membangun aturan main terhadap interaksi negara-negara luar di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik yang berdasarkan pada prinsip kerja sama, keterbukaan, inklusivitas, transparansi, penghormatan atas hukum internasional, dan rasa saling percaya serta penghargaan terhadap satu sama lain. Oleh karena adanya konstruksi gagasan kolektif akibat interaksi antar berbagai negara anggota dari ASEAN maka peran Indonesia adalah peran strategis dalam memimpin arsitektur kawasan sehingga secara kongkrit dapat memberikan manfaat kepada masyarakat regional dan global dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai *world's engine of sustainable growth*. Dengan keketuaan Indonesia diharapkan dapat terus dihasilkan rumusan pada tataran implementasi dan operasionalisasi dari *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) atau Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik Penegasan posisi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dalam peranannya untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik (Asia Pasifik dan Samudera

Hindia). Indo-Pasifik sebagai kawasan yang sangat strategis, sehingga rumusan yang dihasilkan bisa bersifat komprehensif dari pendekatan keamanan, ekonomi, dan pembangunan sehingga aktivitas ekonomi kreatif, ekonomi digital bisnis dan investasi, dan infrastruktur dan lainnya dapat menyokong pembangunan berkelanjutan.

Indonesia bertekad mengawal menuju ASEAN 2045 lebih adaptif, responsif, serta kompetitif yang diperjuangkan dengan cara “ASEAN way”. Jadi “ASEAN way” ini sejalan dengan semangat kerja sama dan implementasi prinsip Piagam ASEAN. Indonesia juga membawa agenda untuk melanjutkan kembali negosiasi atas pembentukan kode tata perilaku (*Code of Conduct/CoC*) untuk pihak-pihak yang bersengketa di Laut China Selatan. Hal ini dilakukan mengingat ketegangan di Laut China Selatan kian meningkat sehingga diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia juga berperan dalam mengatasi isu atau perkembangan Myanmar yang berdampak langsung terhadap stabilitas kawasan. Ketetuaan Indonesia dalam ASEAN diharapkan dapat memperkuat kesepakatan sehingga membuktikan efektivitas kelembagaan ASEAN dalam mengatasi isu internalnya sendiri. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan diri ASEAN dan membuktikan kredibilitas ASEAN dalam menjaga keamanan, perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia sehingga dapat menciptakan pertumbuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, kawasan, dan dunia. Pertumbuhan ekonomi ASEAN dengan jumlah penduduk gabungan sebesar 685 juta jiwa telah mencapai USD 3.2 triliun pada tahun 2022. Jika dilihat sebagai satu kekuatan ekonomi global, ASEAN menduduki peringkat ekonomi terbesar ketiga di Asia dan kelima di dunia setelah Amerika Serikat, China, Jepang, dan Jerman. Sejak 2021, pertumbuhan ekonomi ASEAN juga telah menunjukkan angka yang positif. Hal ini membuktikan potensi ekonomi dan perdagangan ASEAN yang tinggi.⁴⁸ “Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai USD3.36 triliun pada 2021, sehingga menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi terbesar kelima di dunia. Hal ini didukung pula dengan jumlah populasi di kawasan ASEAN yang mencapai lebih dari 650 juta jiwa,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan *closing speech* pada acara DBS Asian Insights Forum 2023 secara virtual dari Jakarta Pusat, Rabu (15/03/2023).⁴⁹

Tingkat perdagangan ASEAN dengan negara-negara mitra juga bertumbuh signifikan, mencapai 34% dalam dekade terakhir. Sementara itu, nilai investasi asing yang masuk ke ASEAN pada 2021 mencapai USD179 miliar dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor keuangan dan asuransi yakni sebesar 32%. Dari sisi inflasi, mayoritas negara ASEAN juga

⁴⁸ “ASEAN 2023 Jangkar Stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan “14 Februari 2023 dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/ktt_asean_2023_jangkar_stabilitas_dan_pertumbuhan_berkelanjutan(diakses 20 Juni 2023)

⁴⁹“ Indonesia mendorong kawasan ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia” , 16 Maret 2023 dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47970/indonesia-dorong-kawasan-asean-menjadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi-dunia/0/berita> (diakses pada 20 Juni 2023)

berada di bawah level inflasi global pada tahun 2022.⁵⁰ Dengan demikian tema “*Epicentrum of Growth*” bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. Oleh karena itu peran Indonesia dalam Ketetuaan ASEAN memiliki tujuan untuk memperkuat pemulihan ekonomi serta menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Setelah mencari data, mengolah data, hingga menganalisis data dan menemukan hasil penelitian maka penulis memberikan kesimpulan dari serangkaian proses penelitian tersebut. Perspektif konstruktivisme hadir dengan pendekatan yang lebih kompleks. Struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh *shared ideas* (gagasan-gagasan yang diyakini bersama). Identitas dan kepentingan Indonesia lebih ditentukan oleh *shared ideas* artinya peran dan tindakan Indonesia tidak ditentukan oleh kepentingan, alasan atau motif dari Indonesia sendiri tetapi dibentuk oleh interaksi antara negara anggota ASEAN dalam struktur sosial ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dalam lembaga ASEAN. Peran Indonesia dalam Ketetuaan ASEAN 2023 bukan hanya sekedar power negara Republik Indonesia ataupun hanya terjalin kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN namun lebih dari itu. Konstruktivisme merupakan perspektif yang mampu menjawab dengan memasukkan unsur identitas (*identity*) dan kepentingan (*interest*). Unsur-unsur tersebut akan mampu menjawab Peran Indonesia dalam Ketetuaan ASEAN 2023. Peran Indonesia dalam Ketetuaan ASEAN 2023 melihat identitas dan kepentingan Indonesia sebagai aktor di Kawasan Asia Tenggara yang lebih ditentukan oleh *shared ideas* daripada kepentingan material. Artinya peran Indonesia dalam Ketetuaan ASEAN 2023 dibentuk oleh interaksi antar negara anggota dalam lingkungan ASEAN. Konstruksi hidup bersama dalam komunitas internasional merupakan sebuah proses interaksi yang dijalin antar negara anggota yang dibentuk atas unsur identitas, nilai, kepentingan dan maksud. Peran Indonesia didasarkan pada *human centric approach* tidak berdasarkan kalkulasi untung rugi sehingga Indonesia melihat negara-negara di kawasan ASEAN dan global adalah sebagai ‘kawan’. Peran Indonesia dalam Ketetuaan ASEAN 2023 adalah menunjukkan peran yang strategis serta sebagai kawan bagi semua negara anggota ASEAN, Peran strategis dalam memimpin arsitektur kawasan yang secara kongkrit dapat memberikan manfaat kepada masyarakat regional dan global dan menjadikan kawasan ASEAN sebagai *world’s engine of sustainable growth*. Melalui tema Ketetuaan ASEAN yaitu: “ASEAN Matters: *Epicentrum of Growth*”, Indonesia bertekad mengarahkan kerja sama ASEAN tahun 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, untuk kemakmuran rakyat ASEAN. Ketetuaan Indonesia ini sekaligus memberikan peluang dan menunjukkan peran strategis Indonesia memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan ASEAN utamanya dalam membentuk tatanan kawasan yang

⁵⁰ *ibid*

mendasarkan pada multilateralisme dan nilai-nilai inklusivitas. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif konstruktivisme mengidentifikasi peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 adalah peran strategis sebagai motor perdamaian, kesejahteraan, pemimpin arsitektur kawasan dengan memasukkan faktor atau unsur identitas, kesepahaman mengenai identitas kolektif dan kepentingan ASEAN bukan kepentingan Indonesia semata, memberikan manfaat kepada masyarakat regional dan global serta menjadikan kawasan ASEAN sebagai *world's engine of sustainable growth*.

Referensi

- “About ASEAN “ dalam <https://asean.org/about-asean>
- Adi W, Anugrah. (2009). Konstruktivisme Dalam Pembelajaran Hubungan Internasional. Diakses dari Internasional. <http://awanxhi.wordpress.com/2009/02/08/konstruktivismedalampembelajaranhubungan-internasional/>
- Alexandrov, “The Concept of State Identity in International Relations: A Theoretical Analysis,” *Journal of International Development and Cooperation* 10 (1). 2003.
- “ASEAN 2023 Jangkar Stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan “,14 Februari 2023 dalam https://www.setneg.go.id/baca/index/ktt_asean_2023_jangkar_stabilitas_dan_pertumbuhan_berkelanjutan
- “ASEAN Matters : Epicentrum of Growth “ dalam 28 Februari 2023 dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/makassar2/id/data-publikasi/artikel/3158-mengenal-peran-indonesia-dalam-keketuaan-asean-2023.html>
- Creswell, John W, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, London: SAGE Publications, 2009
- Fariz Ruhiat, and Akim -. 2020. “Klaim Sepihak Donald Trump Terhadap Kota Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Dalam Perspektif Konstruktivisme”. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16 (1):19-30. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3361>.
- Finnemore, Martha *National Interests In International Society* (New York: Cornell University Press, 1996
- Friedrich Kratochwil, *Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of Practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs* Cambridge: Cambridge University Press,1989.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. “Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme. dalam Yulius P. Hermawan. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- “Indonesia resmi jadi Ketua ASEAN 2023: Apa saja tugasnya? “dalam <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-resmi-jadi-ketua-asean-2023-apa-saja-tugasnya>

- Indonesia mendorong kawasan ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia” , 16 Maret 2023 dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47970/indonesia-dorong-kawasan-asean-menjadi-pusat-pertumbuhan-ekonomi-dunia/0/berita>
- Jackson Patrick Thaddeus, and Nexon, Daniel H *"Whence Causal Mechanisms? A Comment on Legro" in Dialogue IO* Vol. 1, 2002
- Jackson, Robert Howard dan Sorensen, George terj. Dadan Suryadipura. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____ (2010). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, 4th Edition. Oxford University Press.
- "Kepanjangan ASEAN: Sejarah, Tujuan, dan Daftar Lengkap Anggota", 19 Juni 2023 dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6780630/kepanjangan-asean-sejarah-tujuan-dan-daftar-lengkap-anggota>
- Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik
Sugiarto Pramono dan Andi Purwono dalam publikasi <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/485/607>, Vol.7 No.2 (2010)
- “Konstruktivisme (Hubungan Internasional“ dalam [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Konstruktivisme_\(hubungan_internasional\)](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Konstruktivisme_(hubungan_internasional))
- “KTT ASEAN 2023: Indonesia resmi jadi ketua ASEAN 2023!”, 8 Maret 2023 dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/KTT-ASEAN-2023.aspx>
- KTT ASEAN 2023 dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/KTT-ASEAN-2023.aspx>
- Patton, Michael Quinn, and Cochran, Michael *A Guide to Using Qualitative Research Methodology*. London: Research Officer MSF. 2002.
- Peranan Indonesia “dalam <https://setnasasean.id/peranan-indonesia>
- Ruhiat, Fariz, and Akim -. 2020. “Klaim Sepihak Donald Trump Terhadap Kota Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Dalam Perspektif Konstruktivisme”. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16 (1):19-30. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3361>.
- “Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan ASEAN” dalam https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean, 17 Maret 2015
- “Sejarah dan Tujuan Pembentukan ASEAN diawali persamaan antarnegara “ dalam <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221202135439-569-881914/sejarah-dan-tujuan-pembentukan-asean-diawali-persamaan-antarnegara>, 07 Desember 2022
- Waltz, Kenneth *Theory of International Politics* (McGraw-Hill Higher Education, 1979)
- Wendt, Alexander *"Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics"* in *International Organization* 46:2, Spring 1992
- _____, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)

Wicaksana, I Gede Wahyu di dalam Dugis, Vinsensio, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik* Cakra Studi Global Strategis (CSGS), Surabaya , Cetakan Pertama, Desember 2016